



***Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Taman Harmoni Keputih di Kota Surabaya**

Rafael Putra Dinata^{1*}, Yusuf Hariyoko², Wahid Hidayat³

¹⁻³ Adminstrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: rafaelputra47@gmail.com^{1*}, yusufhari@untag-sby.ac.id², da474at@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: rafaelputra47@gmail.com

Abstract. *The rapid pace of urbanization in Indonesia demands a more collaborative approach to the management of Urban Green Open Spaces (GOS). Responding to this challenge, this study examines the implementation of collaborative governance at Taman Harmoni Keputih, Surabaya, by adopting the integrative framework proposed by Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012). Employing a descriptive qualitative method, data were collected through interviews, observation, and documentation studies conducted from April to June 2026. Field findings indicate that the synergy established among the Environmental Agency (DLH), Transportation Agency, Keputih Sub-district Office, Joint Business Group (KUBE), and private sector has been functioning effectively. This partnership has proven capable of optimizing park maintenance, stimulating the local economy, and fostering a sense of ownership among residents. Nevertheless, community and KUBE participation remains limited to the implementation phase. Furthermore, cross-sector coordination is still confined to the technical-operational level, accompanied by an adaptive pattern toward field constraints that tends to be situational. Therefore, this study recommends strengthening public involvement in decision-making processes, developing accountable standard operating procedures (SOPs), and enhancing KUBE's institutional capacity to create a more inclusive and sustainable governance framework.*

Keyword: *Collaborative Governance; Community Empowerment; Harmoni Keputih Park; Urban Green Space; Urban Park Management.*

Abstrak. Pesatnya laju urbanisasi di Indonesia saat ini menuntut pendekatan yang lebih kolaboratif dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Merespons tantangan tersebut, studi ini mengkaji implementasi collaborative governance di Taman Harmoni Keputih, Kota Surabaya, dengan mengadopsi kerangka kerja integratif dari Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012). Menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang berlangsung sepanjang periode April hingga Juni 2026. Temuan lapangan mengindikasikan bahwa sinergi yang terjalin antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan, Kelurahan Keputih, KUBE, dan pihak swasta telah berfungsi dengan baik. Kemitraan ini terbukti mampu mengoptimalkan pemeliharaan taman, menstimulasi ekonomi lokal, dan menumbuhkan rasa memiliki di kalangan warga. Kendati demikian, partisipasi masyarakat dan KUBE terpantau masih pasif karena baru menyentuh fase pelaksanaan. Selain itu, koordinasi antarsektor masih terjebak pada ranah teknis-operasional, disertai pola adaptasi kendala lapangan yang cenderung bersifat situasional. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan, penyusunan SOP yang akuntabel, serta penguatan kapasitas kelembagaan KUBE demi menciptakan tata kelola yang inklusif dan berkesinambungan.

Kata kunci: Manajemen Taman Perkotaan; Pemberdayaan Masyarakat; Ruang Hijau Perkotaan; Taman Harmoni Keputih; Tata Kelola Kolaboratif.

1. LATAR BELAKANG

Urbanisasi telah menjadi salah fenomena terbesar di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 56% penduduk Indonesia kini tinggal di kawasan perkotaan dengan Jakarta, Surabaya, dan Bandung menjadi pusat urbanisasi terbesar (Rijal & Tahir, 2022). Laju Pertumbuhan urbanisasi menimbulkan dampak negatif seperti

peningkatan polusi udara, pencemaran air, dan berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Saputra et al., 2024) Alih fungsi lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) telah diubah menjadi area pemukiman, hotel, restoran, toko, kantor, jalan raya, tempat parkir, stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), tempat pedagang kaki lima dan area lainnya. Keadaan yang memprihatinkan ini membatasi kebebasan bergerak masyarakat dan mengurangi kemampuan lingkungan dalam menyerap pencemaran (Fiqhi, 2024). Padahal, RTH memiliki fungsi ekologis, sosial, dan estetika yang vital bagi keberlanjutan kota.

UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, memberikan capaian target minimal 30% wilayah kota sebagai RTH, dengan 20% berupa RTH Publik. Pemenuhan amanat tersebut menuntut pendekatan tata Kelola yang kolaboratif sebagaimana didukung juga oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dimana *collaborative governance* dapat menjadi strategi yang relevan untuk menjembatani keterbatasan kapasitas pemerintah dengan sumber daya dan partisipasi publik yang lebih luas. Pada sebagian kota di Indonesia, salah satunya seperti kolaborasi dalam pengembangan dan pengelolaan RTH Pagutan Kota Mataram melalui 4 tahapan yaitu tahapan assesment, tahapan initiation, tahapan *deliberation* dan tahapan *implementation* (Syahida & Dewi, 2025). Kemudian ada juga dari Kota Yogyakarta yang menerapkan prinsip *collaborative governance* dalam pengelolaan RTH hingga pengelolaan ruang publik yang berbasis partisipasi (Suratman & Darumurti, 2020). Namun demikian, dalam penerapannya memang masih ditemukan sejumlah indikasi yang menimbulkan hambatan pada antarsektor. Aktor-aktor yang terlibat meliputi Pemerintah, Perusahaan Swasta/CSR, Komunitas, dan juga Masyarakat sekitar, dalam setiap penerapan konsep *collaborative governance* di kota-kota tersebut.

Kota Surabaya sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia dengan luas wilayah 33.306 Ha (Kota Surabaya | BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur), dalam menghadapi dinamika pengelolaan lingkungan perkotaan yang kompleks. Bentuk pencatatan luasan RTH publik di Kota Surabaya yang dapat dilihat melalui tabel 1.1 berikut.

Tabel 1. Luasan Ruang terbuka Hijau Tahun 2020-2024.

No.	Jenis RTH Publik	2020	2021	2022	2023	2024
1	RTH makam	283,53	284,95	284,95	284,95	284,95
2	RTH lapangan dan stadion	360,58	361,08	361,08	363,42	363,42
3	RTH telaga/waduk/boezem	198,23	198,23	198,23	198,23	198,23
4	RTH dari fasum dan fasos permukiman	205,50	205,50	205,50	205,50	205,50

5	RTH kawasan lindung dan pesisir timur	4.570,33	4.570,33	4.570,33	4.600,33	4.600,33
6	RTH hutan	66,03	66,03	66,03	66,03	66,03
7	RTH taman dan jalur hijau (JH)	1.672,75	1.672,75	1.673,65	1.673,65	1.673,65
	Jumlah Luasan RTH Publik total (Ha)	7.356,96	7.358,87	7.359,77	7.392,11	7.392,11
	Luas Kota Surabaya	33.451	33.451	33.451	33.592	33.592
	Persentase luas RTH terhadap luas	21,99	22,00	22,00	22,01	22,01

Sumber: (Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025)

Pada Tabel 1. diatas, data dari RKPD Kota Surabaya mencatat bahwa luasan RTH publik Kota Surabaya telah melampaui batas minimal yang telah ditentukan, yakni mencapai 22% dari total area kota, meningkat secara marginal (21,99%) pada tahun 2020 dan terakhir tercatat 22,01% di tahun 2024. Kendati demikian, pengelolaan RTH masih menghadapi tantangan berupa stagnasi perluasan area hijau, keterbatasan anggaran daerah, dan belum optimalnya pelibatan masyarakat serta pada sektor swasta. Komitmen strategis jangka panjang pemerintah kota tercermin dalam peraturan daerah nomor 3 Tahun 2025 tentang RTRW Kota Surabaya Tahun 2025-2024 yang menargetkan RTH sebesar 30% dari total wilayah (jdih.surabaya.go.id).

Salah satu upaya pengelolaan RTH berbasis kolaborasi di kota Surabaya adalah Pembangunan Taman Harmoni keputih, transformasi lahan bekas pencemaran dan konflik sosial (Liputan6, 2001). Sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1. Dokumen Berita surabaya.go.id

Sumber: surabaya.go.id

Proses awal revitalisasi sampai peresmian tahun 2025 melibatkan peran dari berbagai aktor, seperti Lembaga-lembaga Pemerintah Kota Surabaya (DLH, DPRKPP, DSDABM, Dinkopumdag, Dishub), Partisipasi Perusahaan besar seperti Pakuwon, Royal Residence, dan Ciputra yang tercermin sebagai bentuk investasi korporasi terhadap wilayah Surabaya melalui

pengadaan arena bermain dan fasilitas tematik lainnya (surabaya.go.id), bagi pemerintah kota, CSR berfungsi sebagai sumber daya tambahan untuk menutup keterbatasan anggaran, mempercepat penyediaan fasilitas publik, serta meningkatkan kualitas desain dan sarana taman (Afwa Sayudha et al., 2023).

komunitas Jalak & KBS dalam pemeliharaan satwa dan edukasi konservasi (Fatoni, 2025), serta kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai wadah UMKM di area Taman Harmoni (Syifa, 2025). Namun Keberhasilan Struktural ini tidak serta-merta menjamin efektivitas pengelolaan, masalah seperti rendahnya kepatuhan terhadap tata tertib, sulitnya mengontrol arus pengunjung, hingga ketimpangan beban antara aktor pemerintah dan KUBE yang masih minim kapasitas kelembagaan.

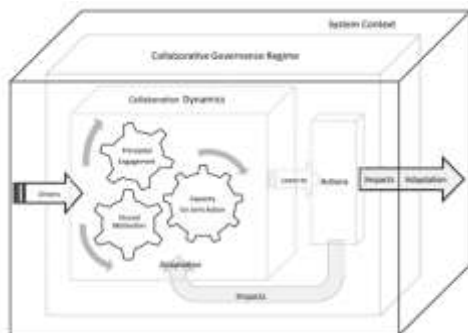
Kompleksitas persoalan tersebut mendorong penelitian ini untuk mengadopsi kerangka integratif dari Emerson, Nabatchi, & Balogh dalam (Noor et al., 2022), yang mendefinisikan *collaborative governance* sebagai metode perumusan kebijakan dan manajemen publik yang melibatkan aktor-aktor di luar pemerintah ke dalam penyelenggaraan kepentingan publik secara kolektif. Kerangka ini dipilih karena mampu menangkap tidak hanya proses kolaborasi, tetapi juga kondisi awal, dinamika kolaborasi, dan dampak yang di hasilkan, sehingga melampaui pendekatan parsial dari Ansell & Gash (2008) maupun dari O’Leary & Bingham (2006).

Penelitian ini untuk menganalisis bagaimana *collaborative governance* diterapkan dalam pengelolaan Taman Harmoni Keputih di Kota Surabaya. Hasil penelitian ini memberikan pandangan bahwa penerapan *collaborative governance* dalam pengelolaan Taman Harmoni Keputih telah berjalan secara struktural melalui kolaborasi antar stakeholder, khususnya terkait dalam membantu kestabilan ekonomis masyarakat lokal yang berjualan di sekitar Taman, meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan, serta meningkatkan kualitas pengalaman pengunjung di Taman Harmoni.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini menggunakan pendekatan *collaborative governance* menurut Emerson, Nabatchi, & Balogh, (2012), yang menggambarkan kerangka integratif menjadi tiga dimensi yaitu; (1) *general system context*, (2) *collaborative governance regime* (CGR); dan (3) *collaborative dynamics* dan *actions*, yang menjelaskan secara rinci bagaimana proses kolaborasi yang bersifat dinamis dan bersiklus, dengan menghasilkan tindakan tindakan dan dampak sementara, sebelum

mengarah pada dampak utama, serta adaptasi terhadap dampak sementara, penggambaran analysis menggunakan kerangka integratif dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut.



Gambar 2. Kerangka Teori Collaborative Menurut Emerson, Nabatchi,

Sumber: (Emerson et al., 2012)

Kerangka ini dipandang relevan untuk menganalisis pengelolaan Taman Harmoni, karena mampu menjekaskan bagaimana kerja sama antara pemerintah, swasta, dan publik memperkuat tanggung jawab kolektif dalam pengelolaan taman sebagai ruang publik yang berkelanjutan. Studi ini berfokus pada penerapan collaborative governance dalam pengelolaan Taman Harmoni Keputih di Kota Surabaya dengan menggunakan model Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012), serta menyoroti tantangan kolaborasi antaraktor di level lokal yang belum banyak dikaji sebelumnya.

Penelitian yang berjudul “Kolaborasi Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan di Kabupaten Lamongan” (Pranawa et al., 2023). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, serta teori yang digunakan adalah (Ansell & Gash, 2008). Hasil sementara dapat dilihat dari feedback masyarakat yang bersifat positif, RTH perkotaan Lamongan sudah mulai lebih bersih dan terawat dan ada beberapa penambahan fasilitas berupa lampu, tempat duduk dan fasilitas lain. Adanya kebijakan atau landasan hukum menjadi faktor pendukung terlaksananya ruang terbuka hijau, pendistribusian informasi dan tugas antar stakeholder juga terencana cukup baik dan minim hambatan, informasi lain juga terbuka untuk publik melalui website dan media sosial Dinas Lingkungan Hidup. Namun, terdapat ketergantungan antar-stakeholder akibat keterbatasan SDM, anggaran, dan fasilitas, yang memunculkan perbedaan kepentingan serta menghambat pengambilan keputusan, sehingga kolaborasi kurang optimal. Sementara itu, Perbedaan antara penelitian ini dan yang akan dilakukan terletak pada fokus penelitian yang lebih menekankan tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan Taman Harmoni Keputih di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan kerangka integratif dari Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) untuk menjelaskan

mekanisme kolaborasi antar aktor (termasuk CSR swasta seperti Pakuwon dan Ciputra, komunitas Jalak, KBS, dan KUBE), tantangan operasional yang meliputi kepatuhan pengunjung, ketidakseimbangan wewenang pengelola, serta rendahnya kesadaran lingkungan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yaitu data yang mengandung makna (Abdussamad, 2021). Sejalan dengan hal tersebut, (Hafni Sahir, 2021), berpendapat bahwa metode kualitatif adalah metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi terhadap suatu fenomena, dengan pendekatan data yang menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat lisan maupun penulisan dari objek penelitian.

Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam mengenai *collaborative governance* dalam Pengelolaan Taman Harmoni, dengan mengacu pada kerangka integratif (CGR) menurut Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012), penelitian dilaksanakan selama kurang lebih tiga (3) bulan (April-Juni 2026). Penelitian kualitatif deskriptif berfokus pada upaya untuk memaparkan dan menguraikan kenyataan yang ada di lapangan secara teratur, berdasarkan fakta, dan memperlihatkan konteksnya, tanpa bertujuan untuk menguji hipotesis atau membuat generalisasi secara statistik, (Sulung & Muspawi, 2024).

Adapun data-data lain yang digunakan guna mendukung penulisan, terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, data sekunder berupa peraturan daerah, laporan resmi, Menurut (Sugiyono, 2019), data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama oleh peneliti. Artinya, peneliti sendiri yang terlibat secara langsung dalam proses pengumpulan data di lokasi penelitian. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

***Collaborative Governance* diterapkan dalam Pengelolaan Taman Harmoni Keputih**

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Penerapan *collaborative governance* dalam pengelolaan Taman Harmoni Keputih secara umum telah berjalan secara fungsional operasional, meskipun belum sepenuhnya mencapai tahap kolaborasi yang setara dan strategis di antara seluruh aktor yang terlibat. Dalam penelitian ini, fokus analisis utama diarahkan pada tiga indikator

operasional dari kerangka CGR, yakni Dinamika Kolaborasi, Tindakan Kolaboratif, serta Dampak dan Adaptasi, karena ketiga indikator inilah yang menjadi fokus penelitian.

Dinamika Kolaborasi

Dinamika Kolaborasi dapat dilihat dari cara pemangku kepentingan berkomunikasi, menyelaraskan tujuan, membagi peran, serta mengakomodasi beragam kepentingan dalam proses pengelolaan taman tersebut. Strategi ini berasal dari komitmen perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, dalam dokumen tersebut secara eksplisit bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau sebagai bagian dari visi kota seperti menjadi kota yang progresif, berorientasi pada masyarakat, serta berkelanjutan. Penggunaan indikator-indikator seperti Dinamika Kolaborasi yang memiliki tiga unsur utama, yakni *principled engagement*, *shared motivation*, dan *Capacity for joint action*. Ketiga unsur tersebut dapat berfungsi sebagai acuan untuk menilai apakah kerja sama yang berlangsung di Taman Harmoni masih terbatas pada pelaksanaan tugas masing-masing lembaga atau telah berkembang menjadi proses kolaboratif yang secara aktif melibatkan berbagai pihak.

Principled Engagement

Temuan lapangan menunjukkan bahwa dengan adanya peran dari Pemerintah Kota melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, yang mengembangkan Taman Harmoni dengan menggabungkan fungsi-fungsi yang sebelumnya belum pernah ada dalam pengelolaan taman pada lingkup Kota Surabaya maupun kota lain, seperti fungsi ekologi, fungsi edukasi, fungsi rekreasi dan fungsi ekonomi. selain DLH, ada juga peran dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam pengelolaan parkir, kelurahan Keputih yang juga memfasilitasi forum koordinasi, serta peran tambahan dari KUBE yang terlibat dalam pengelolaan Kawasan UMKM dan wahana. Keterlibatan multi pihak ini sejalan dengan target Renstra DLH Tahun 2021-2026 yang menekankan optimalisasi pengelolaan lingkungan melalui pendekatan kolaboratif sesuai dengan indikator *principled engagement*. Namun, keterlibatan masyarakat lebih kuat pada tahap pelaksanaan dibandingkan dengan perumusan kebijakan. Sehingga *principled engagement* yang terbentuk masih belum sepenuhnya setara di antara para aktor.

Shared Motivation

Berdasarkan laporan capaian kinerja (LKJIP) DLH Kota Surabaya Tahun 2023, sebagaimana dilihat pada penargetan nilai SAKIP sebesar 89,60 dengan tingkat pencapaian indikator perangkat daerah mencapai 98,56% angka- angka tersebut yang menunjukkan komitmen

DLH sebagai Lembaga yang diberi tugas untuk mengelola taman sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan terus mengupayakan pencapaiannya secara konsisten. Di sisi lain, Dinas Perhubungan menilai koordinasi yang terjalin sudah efektif. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku usaha, sejumlah pedagang merasa keluhan mereka tidak di tangani dengan cepat, sehingga kepercayaan pelaku usaha terhadap petugas pengelola taman dapat melemah. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam indikator *shared motivation* sudah muncul, namun belum merata di seluruh lapisan aktor yang terlibat.

Capacity for Joint Action

Temuan lapangan menunjukkan bahwa pembagian peran yang cukup jelas antara DLH, DISHUB, BPBD, Kelurahan, KUBE, Pelaku Usaha. Mekanisme koordinasi yang sudah berjalan melalui Petugas Operasional, Grup Koordinasi, serta dukungan CSR untuk pengembangan taman. Hal ini juga selaras dengan komitmen dalam Renstra DLH Tahun 2021-2026 terkait pentingnya menarik perhatian CSR dalam menangani permasalahan lingkungan hidup. Kapasitas kolaborasi yang sudah terbentuk, bagaimanapun juga masih bersifat teknis-operasional. KUBE dan pelaku usaha yang paling merasa kolaborasi belum sepenuhnya menjadi ruang pengambilan Keputusan strategis bersama, struktur kolaborasi cenderung bersifat sebagai pelaksana daripada mitra yang setara dalam menentukan arah pengelolaan. Untuk itu perlu adanya keterlibatan KUBE dan pelaku usaha dalam pengambilan Keputusan strategis, agar kapasitas dari kolaborasi yang sudah terjalin lebih berkembang dan melampaui teknis operasional yang masih berjalan untuk sekarang ini.

Tindakan Kolaborasi

Istilah “tindakan kolaboratif” merujuk pada berbagai Langkah konkret yang dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai pihak guna mencapai tujuan pengelolaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks pengelolaan Taman Harmoni Keputih, terdapat empat (4) strategi utama yang dapat diidentifikasi:

Pengawasan dan Pemeliharaan Taman

aspek pengawasan dan pemeliharaan merupakan upaya kolaboratif yang paling terlihat. Temuan lapangan menunjukkan bahwa DLH Kota Surabaya telah menugaskan staff operasional dalam tiga shift, kemudian juga ada tindakan seperti pemasangan kamera CCTV, dan penggunaan pengeras suara untuk menginformasikan hal-hal yang penting kepada pengunjung. Kendati demikian, upaya pengawasan maupun pemeliharaan tersebut belum optimal secara menyeluruh. persoalan sampah masih menjadi persoalan, entah itu di area bermain maupun di sekitar area

SorPring, kemudian menyangkut perilaku pengunjung lainnya seperti pelanggaran merokok, piknik di area yang bukan seharusnya, menaiki properti taman (Patung) demi foto yang bagus. Kondisi ini yang mengindikasikan kurangnya controlling terkait fasilitas maupun masih di lingkup taman. Hal ini adalah masalah kultural yang membutuhkan pendekatan edukasi bukan hanya penindakan teknis atau pemberian sanksi saja. Untuk itu perlu adanya penguatan program edukasi terhadap kesadaran akan pengunjung di Taman Harmoni.

Pengaturan Parkir dan Lalu Lintas

Dalam hal pengelolaan parkir dan lalu lintas, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya telah menugaskan petugas di lapangan sebagai bentuk pemantauan langsung. Keterlibatan Dishub ini merupakan contoh dari kerjasama antar institusi yang sejalan dengan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, khususnya dalam upaya mewujudkan tata Kelola perkotaan yang terintegrasi. Namun, di samping keadaan taman yang hanya ramai di libur akhir pekan atau saat weekend saja, kepadatan arus lalu lintas masih terjadi dan tindakan yang dilakukan oleh petugas masih bersifat pengendalian teknis yang reaktif (melihat kondisi lapangan), belum mencapai tingkat perencanaan strategis bersama, seperti penerapan sistem zonasi dan tataran antisipasi sistemik. Kondisi ini memnunjukkan perlunya peningkatan koordinasi antara DLH dan Dishub dalam Menyusun skema pengelolaan lalu lintas yang lebih terencana dan antisipasif.

Kolaborasi Pengelolaan

kerjasama antar pemangku kepentingan seperti instansi pemerintah, swasta lewat CSR, dan komunitas/organisasi yang terlibat. Contohnya seperti pengadaan papan informasi di area antartika, eropa, dan zona lainnya, yang menandakan bahwa adanya kolaborasi dan kontribusi dari Perusahaan swasta terkait konsep dan Pembangunan, kemudian juga inisiasi DLH, KUBE, dan BUMD (Kebun Binatang Surabaya) terkait pengadaan satwa serta pengelolaan edukasi dan pemberdayaan warga sekitar. Strategi ini sejalan dengan komitmen Renstra DLH untuk mendorong pemberdayaan kelompok Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Perluasan kemitraan serupa ke sektor swasta lain yang belum terlibat dapat menjadi Langkah strategis berikutnya untuk keberlanjutan program edukasi dan pemberdayaan di Taman Harmoni.

Edukasi dan Partisipasi Masyarakat

Dalam aspek ini, Kelurahan Keputih memainkan peran penting melalui jaringan RT/RW sebagai saluran koordinasi. Berdasarkan hasil wawancara, pedagang juga mengatakan bahwa adanya kegiatan kerja bakti dan grup koordinasi sebagai cara berkoordinasi antar pihak.

Kesuluruhan tindakan yang dilakukan, mencerminkan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai dasar keberlanjutan pengelolaan taman. Namun, situasi ini menandakan keterlibatan kelompok bawah masih terbatas pada tingkat implementasi, bukan pada tingkat perencanaan kebijakan maupun evaluasi. Sehingga perlu adanya pertimbangan dalam memberikan kesempatan bagi warga dan pedagang agar keterlibatan mereka tidak hanya terbatas pada pelaksanaan, tetapi juga mencakup partisipasi dalam pengambilan Keputusan.

Dampak dan Adaptasi dalam Proses Kolaborasi

Indikator terakhir dalam kerangka collaborative governance Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012), adalah dampak dan adaptasi, yang merujuk pada sejauh mana proses kolaborasi menghasilkan perubahan serta seberapa baik para aktor dapat beradaptasi terhadap hambatan yang muncul selama proses pengelolaan. Ada empat (4) komponen utama yang dapat digunakan untuk menganalisis seberapa optimal pengelolaan Taman Harmoni Keputih.

Dampak terhadap Efektifitas Pengelolaan

Kolaborasi antara para pemangku kepentingan dalam pengelolaan Taman Harmoni berdampak positif terhadap efektivitas pelayanan publik. DLH menyatakan bahwa pembagian tugas dengan tim operasional memungkinkan pemeliharaan dan penanganan keluhan lebih cepat, karena masalah-masalah kecil dapat ditangani langsung di lokasi tanpa harus melalui proses birokrasi yang panjang. Hal ini mencerminkan salah satu manfaat utama kolaborasi, yakni kemampuan untuk mendistribusikan beban kerja secara lebih merata di antara para aktor yang terlibat. Situasi ini menunjukkan bahwa dampak dari kolaborasi ini baru menyentuh permukaan sistem, sementara akar masalah seperti rendahnya kesadaran dan kepatuhan di kalangan pengguna ruang publik, belum berhasil ditangani secara kolaboratif dan sistematis. Pengembangan program edukasi terhadap lingkungan yang dapat dirancang dan dilaksanakan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan, sehingga dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat yang peduli akan lingkungan.

Dampak terhadap Pemberdayaan Ekonomi

kolaborasi dalam pengelolaan Taman Harmoni telah terbukti membuka peluang ekonomi bagi warga setempat, khususnya warga Keputih melalui perekrutan tenaga kerja lokal, ada andil dari keberadaan KUBE yang memandang taman sebagai ruang ekonomi Masyarakat, dan juga para pedagang yang mengakui langsung dampak ekonomi yang mereka rasakan secara langsung. Sebagaimana disebutkan juga dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun

2021-2026, keterlibatan Perusahaan Swasta seperti Pakuwon, Royal Residence, Ciputra Group melalui CSR untuk pengembangan taman. Namun, diantara pemerintah dan pelaku UMKM memiliki perbedaan pandangan yang berbeda mengenai seberapa efektif pemberdayaan ini. Para pedagang mengukur keberhasilan berdasarkan penjualan, jumlah pelanggan dan keberlanjutan usaha. Sebaliknya pemerintah mengukur keberhasilan dari perspektif kelembagaan, seperti pembentukan struktur KUBE dan program-program yang mendukung pemberdayaan lainnya.

Dampak terhadap Kepemilikan Masyarakat

Dalam aspek ini, terkait keterlibatan KUBE terhadap pengelolaan area UMKM serta Wahana, menunjukkan bahwa kolaborasi mulai menumbuhkan rasa memiliki terhadap keberadaan Taman Harmoni. Adanya kegiatan Masyarakat yang cukup aktif di area UMKM (Ngisor Pring) dan di fasilitas-fasilitas yang ada di taman, menunjukkan bahwa masyarakat mulai berperan sebagai penjaga dan pengelola informal ruang publik dan bukan hanya menjadi pengguna pasif. Namun, apabila keterlibatan masyarakat masih terbatas pada kegiatan teknis seperti pelibatan masyarakat hanya dalam kegiatan kerja bakti dan kegiatan ekonomi. Rasa kepemilikan yang sebelumnya sudah dibangun akan mudah memudar, apabila kepentingan ekonomi mereka tidak dipenuhi atau aspirasi mereka tidak di dengar dalam proses pengambilan Keputusan.

Adaptasi terhadap Tantangan Lapangan

Kemampuan para aktor untuk beradaptasi dengan masalah yang muncul di lapangan merupakan indikator utama dalam mengevaluasi kematangan proses kolaborasi. Tiga bentuk adaptasi dapat diidentifikasi dalam pengelolaan Taman harmoni. Pertama, adaptasi terhadap pelanggaran pengunjung, yang dilakukan melalui penggunaan pengeras suara dan teguran langsung oleh staf operasional. Kedua, sebagai tanggapan atas keluhan dari pengunjung, DisHub melakukan penambahan akses keluar dari satu akses, kini menjadi dua akses untuk mengurangi kepadatan area parkir dan juga untuk meningkatkan aksesibilitas pengunjung. Ketiga, pihak Kelurahan Keputih yang mempertimbangkan aspek keadilan, contohnya seperti mengupayakan sistem rotasi pelaku usaha agar semua warga memiliki akses keuangan yang adil.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Melalui analisis yang telah dilakukan terhadap penerapan collaborative governance dalam pengelolaan Taman Harmoni Keputih di Kota Surabaya dengan menggunakan kerangka integratif Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012), pengelolaan telah berjalan secara struktural dan

menghasilkan sejumlah capaian kolaboratif yang nyata, meskipun masih menghadapi keterbatasan pada aspek keberlanjutan ekonomi, kesetaraan partisipasi, serta kapasitas pengambilan Keputusan bersama yang inklusif. Kesimpulan penelitian ini dapat diuraikan berdasarkan tiga dimensi utama sebagai berikut.

Dinamika Kolaborasi (*Collaborative Dynamics*)

Pengelolaan Taman Harmoni Keputih melibatkan berbagai aktor yang membentuk sebuah Dinamika Kolaborasi yang fungsional. Di dalamnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bertindak sebagai koordinator teknis pengelola taman, Dinas Perhubungan sebagai pengelola parkir dan lalu lintas, Kelurahan Keputih sebagai fasilitator Komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai mitra pemberdayaan ekonomi lokal, seerta Perusahaan swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai penyedia sumber daya fisik dan pengembangan zona tematik. Kendati demikian, peninjauan ketiga sub-indikator Dinamika Kolaborasi mengindikasikan bahwa kolaborasi yang terbentuk belum sepenuhnya optimal. Pertama, principled engagement atau penggerakan prinsip bersama, keterlibatan elemen masyarakat dan KUBE dinilai belum inklusif karena porsi lebih besar dalam pelaksanaan program ketimbang perencanaan atau perumusan. Kedua, shared motivation atau motivasi bersama sudah muncul melalui komitmen institusional dan manfaat ekonomi yang dirasakan sebagai aktor, namun belum merata di seluruh lapisan, khususnya pada pelaku UMKM yang masih merasakan lambannya respons pengelola terhadap keluhan mereka. Ketiga, capacity for joint action atau kapasitas untuk bertindak bersama, pembagian kerja antarlembaga memang sudah cukup jelas, namun koordinasi masih berada pada tataran teknis-operasional dan belum berkembang ke arah forum pengambilan Keputusan strategis yang melibatkan semua aktor secara proporsional.

Tindakan Kolaboratif (*Collaborative Action*)

Pengelolaan Taman Harmoni Keputih telah mengimplementasikan empat langkah strategis meliputi pengawasan dan pemeliharaan taman, pengaturan parkir dan lalu lintas, kolaborasi pengelolaan lintas sektor, serta edukasi dan partisipasi masyarakat. Di antara empat strategi tersebut, kolaborasi pengelolaan lintas sektor yang melibatkan sinergi dari DLH, Kebun Binatang Surabaya (KBS), dan KUBE dalam pengelolaan satwa dan wahana edukatif menjadi manifestasi Tindakan kolaboratif yang paling konkret dan menunjukkan hasil paling positif. Kendati demikian, keberhasilan pada indikator ini secara menyeluruh belum mencapai kondisi

yang optimal. Pada aspek pengawasan perilaku pengunjung, pendekatan teknis, seperti keterbatasan jangkauan CCTV dan faktor budaya masyarakat, sehingga pelanggaran tata tertib masih sering terjadi. Di sisi lain, pengaturan parkir pun masih bersifat reaktif terhadap kondisi lapangan, belum didukung oleh perencanaan sistemik yang lebih antisipatif. Kemudian, dari aspek partisipasi masyarakat dalam kegiatan edukasi masih berada pada level implementasi, belum menjangkau level perencanaan dan evaluasi kebijakan bersama.

Dampak dan Adaptasi dalam Proses Kolaborasi (*Impacts and Adaptation*)

Implementasi kolaborasi dalam mengelola Taman Harmoni telah menghasilkan sejumlah dampak positif. Dari aspek efektivitas pengelolaan, pembagian beban kerja antar aktor memungkinkan pemeliharaan dan penanganan keluhan lapangan berlangsung lebih cepat tanpa harus melalui birokrasi yang panjang. Dari sisi pemberdayaan ekonomi, keberadaan KUBE dan fasilitas terhadap UMKM telah membuka peluang kerja dan sumber penghasilan bagi warga keputih yang sebelumnya tidak memiliki akses ekonomi yang memadai. Sementara itu, dari perspektif masyarakat, keterlibatan aktif warga dalam kegiatan operasional taman mulai menumbuhkan rasa memiliki terhadap Taman Harmoni sebagai ruang publik bersama. Bentuk adaptasi atau evaluasi dari para aktor telah menunjukkan kemampuan yang lebih responsif dalam menyikapi hambatan di lapangan. Hal ini terlihat dari langkah Dinas Perhubungan yang menambahkan area parkir dan akses keluar yang dirancang oleh sebagai respons atas keluhan kepadatan pengunjung di akhir pekan, kemudian pengadaan sistem rotasi jadwal berdagang dari pelaku UMKM oleh kelurahan untuk menjaga keadilan ekonomi. Namun, proses adaptasi yang berlangsung masih bersifat kontekstual dan isidental. Akibatnya permasalahan yang lebih mendasar seperti ketidakstabilan pendapatan para pedagang, terbatasnya ruang KUBE dalam pengambilan Keputusan strategis, serta rendahnya kesadaran Sebagian pengunjung terhadap aturan taman, belum tertangani dengan baik dan berkelanjutan.

Saran

Bagi Pemerintah Kota Surabaya dan Dinas Lingkungan Hidup

Pertama, mekanisme partisipasi masyarakat perlu diperkuat secara substansial. Hal ini dapat dicapai dengan membuka ruang keterlibatan masyarakat dan KUBE tidak hanya pada tahap implementasi, tetapi juga mencakup tahap perencanaan program serta evaluasi berkala terhadap kebijakan pengelolaan taman. Forum-forum koordinasi yang selama ini berjalan perlu dilembagakan secara formal dan terjadwal untuk memastikan aspirasi dari seluruh aktor yang

terlibat dapat terakomodasi secara sistemis. Kedua, pengembangan Standar Prosedur Operasional (SOP) yang jelas dan transparan diantara pemangku kepentingan, khususnya terkait pembagian kewenangan dalam menangani pelanggaran pengunjung, prosedur pelaporan dan tindak lanjut atas keluhan serta protokol koordinasi antar lembaga. Kejelasan regulasi SOP ini akan menghilangkan tumpang tindih kewenangan yang selama ini menjadi hambatan dalam respons di lapangan. Ketiga, perlu segera dilakukan peningkatan jangkauan infrastruktur pengawasan seperti penambahan titik pemasangan kamera pengawas (CCTV) di sudut-sudut taman yang belum terjangkau, guna mengoptimalkan efektivitas pemantauan dan penegakan aturan secara lebih menyeluruh.

Bagi Kelompok Usaha bersama

Kapasitas kelembagaan KUBE perlu diperkuat, terutama yang berkaitan dengan kemampuan pengambilan Keputusan secara kolektif, pengelolaan keuangan usaha, serta advokasi kebijakan kepada pemerintah. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Koperasi dan UMKM diharapkan dapat memberikan pendampingan teknis dan pelatihan manajemen organisasi secara berkelanjutan kepada pengurus KUBE, sehingga KUBE dapat meningkatkan perannya menjadi mitra yang sejajar dalam pengelolaan Taman Harmoni, bukan lagi sebatas implementor kebijakan. Di sisi lain, perlu diupayakan sumber pendapatan bagi para pedagang UMKM agar tidak sepenuhnya bergantung pada jumlah pengunjung di akhir pekan. Inovasi seperti sistem pemasaran digital, penyelenggaraan event tematik di hari biasa atau pengembangan produk khas Taman Harmoni dapat menjadi alternatif untuk menstabilkan pendapatan para pelaku usaha.

Bagi Masyarakat dan Pengunjung

Upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat dan rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga Taman Harmoni Keputih memerlukan pendekatan edukatif yang lebih inovatif. Pendekatan melalui kampanye kelestarian lingkungan yang melibatkan komunitas lokal, seolah-olah di sekitar kawasan Keputih, serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana sosialisasi dapat menjadi strategi yang lebih efektif dibandingkan penerapan sanksi semata. Partisipasi aktif pengunjung dalam menjaga kebersihan, ketertiban, dan kelestarian fasilitas taman merupakan elemen yang tidak dapat diabaikan dalam keberlanjutan pengelolaan Taman Harmoni Keputih sebagai ruang publik yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif* (P. Rapanna, Ed., 1st ed.). Syakir Media Press. <https://doi.org/10.31219/osf.io/juwxn>
- Afwa Sayudha, R., Surjono, & Parlindungan, J. (2023). Preferensi pengguna terhadap kualitas taman kota aktif hasil corporate social responsibility di Kota Malang. *Planning for Urban Region and Environment*, 12(2), 1–12.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya. (2025, August 3). *Wali Kota Eri Cahyadi resmikan Taman Harmoni, tawarkan wisata edukasi, kuliner, dan keluarga*. <https://www.surabaya.go.id/id/berita/24044/wali-kota-eri-cahyadi-resmikan-taman-harmoni-tawarkan-wisata-edukasi-kuliner-dan-keluarga>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Fatoni. (2025, August 3). *Revitalisasi Taman Harmoni: Kolaborasi untuk Surabaya yang lebih sehat dan indah*. TAGAR. <https://tagar.co/revitalisasi-taman-harmoni-kolaborasi-untuk-surabaya-yang-lebih-sehat-dan-indah/>
- Fiqhi, M. (2024). *Revitalisasi ruang terbuka hijau tempat pemakaman umum Islam Sudiang Raya Kota Makassar* [Undergraduate thesis, Universitas Hasanuddin].
- Hafni Sahir, S. (2021). *Metodologi penelitian* (T. Koryati, Ed.). Penerbit KBM Indonesia. <https://www.penerbitbukumurah.com>
- Kota Surabaya. (n.d.). Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Retrieved December 5, 2025, from <https://jatim.bpk.go.id/kota-surabaya/>
- Liputan6. (2001, October 18). *Warga Keputih memblokir TPA, Surabaya dipenuhi sampah*. <https://www.liputan6.com/news/read/21996/warga-keputih-memblokir-tpa-surabaya-dipenuhi-sampah>
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *Collaborative governance: Suatu tinjauan teoritis dan praktik*. Bildung Nusantara.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2025–2045. (2025). <https://jdih.surabaya.go.id/peraturan/4620>
- Pemerintah Kota Surabaya. (2025). *Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025*. <https://bappedalitbang.surabaya.go.id/dokumen/tahunan>
- Pranawa, N., Santoso, R. S., & Warsono, H. (2023). Kolaborasi dalam pengelolaan ruang terbuka hijau perkotaan di Kabupaten Lamongan. *Jurnal Public Policy and Management Review*, 12(4), 1–16. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v12i4.41444>
- Rijal, S., & Tahir, T. (2022). Analisis faktor pendorong terjadinya urbanisasi di wilayah perkotaan (Studi kasus wilayah Kota Makassar). *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies*, 3(1), 1–15.
- Saputra, H. Y., Syah, N., Dewata, I., Razak, A., Diliarosta, S., Azhar, A., & Syafrijon. (2024). Urbanisasi dan dampaknya terhadap kualitas lingkungan: Literatur review. *Jurnal Teknik Lingkungan dan Tata Kota*, 2(12), 920–926. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i12.1226>

- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Cetakan ke-1). Alfabeta.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier. *Jurnal Edu Research Indonesian Institute for Corporate Learning and Studies (IICLS)*, 5(3), 1–7. <https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238>
- Suratman, F. N., & Darumurti, A. (2020). Collaborative governance dalam pengelolaan ruang terbuka hijau publik (RTHP) di Kota Yogyakarta. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 2(2), 102–121. <https://doi.org/10.18196/jpk.v2i2.12743>
- Syahida, P. N., & Dewi, D. C. (2025). Analisis aktor dan dinamika collaborative governance dalam pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pagutan Kota Mataram. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA*, 13(2), 1–9. <https://doi.org/10.31289/publika.v13i2.16325>
- Syifa. (2025, August 4). *Wali Kota Eri Cahyadi resmikan Taman Harmoni, tawarkan wisata edukasi, kuliner, dan keluarga.* *SuaraPemerintah.id*. <https://suarapemerintah.id/2025/08/wali-kota-eri-cahyadi-resmikan-taman-harmoni-tawarkan-wisata-edukasi-kuliner-dan-keluarga/>